

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Penanganan konflik antara Syiah dan Sunni di Sampang Madura oleh Hukum Pidana menunjukkan tidak ditegakannya keadilan, terbukti dari divonis bebasnya Rois yang merupakan otak konflik yang diperkuat dari keterangan beberapa saksi yang memberatkan Rois justru korban yaitu Tajul Muluk justru menadapat vonis 4 tahun dengan tuduhan penistaan agama. Sistem Peradilan Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia belum memperhatikan hak korban yang seharusnya diutamakan sebaliknya dengan alasan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia pelaku tindak pidana justru mendapatkan perhatian lebih terbukti dengan banyaknya Pasal dalam KUHAP yang mengatur mengenai Hak tersangka/terdakwa.
2. Korban konflik yaitu warga Syiah yang tidak hanya menderita kerugian secara fisik tetapi juga psikis yang membutuhkan waktu untuk pemulihan belum mendapatkan haknya yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban.

Negara yang merupakan alat kekuasaan dan politik yang seharusnya melindungi, menjaga, memberi rasa aman, damai, tentram terkesan melakukan pembiaran bahkan tidak secara sungguh-sungguh menangani konflik tersebut. Negara yang mempunyai tanggungjawab mengatur hubungan antar warga negaranya seharusnya melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadinya konflik dan memberikan pemulihan setelah terjadinya konflik seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang membahayakan nyawa korban, hal tersebut dapat dilakukan melalui aparat penegak hukum selain itu pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan medis, bantuan kebutuhan para korban serta proses pemeriksaan dan peradilan yang terbuka, adil tanpa memihak.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Melihat adanya ketidakberesan dalam penanganan konflik Syiah dan Sunni di Sampang Madura tersebut menjadikan alasan bahwa Hukum Nasional tidak dapat menanganinya, konflik yang terjadi di Sampang ini tidak hanya sekedar tindak pidana biasa tetapi sudah merupakan pelanggaran HAM, maka seharusnya diselesaikan dengan menggunakan Hukum Internasional.
2. Kepentingan korban yang belum mendapatkan perhatian dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional menjadikan dasar bahwa sudah saatnya aturan yang mengatur mengenai korban diperbaiki, pemerintah harus

mengambil langkah agar warga negaranya yang menjadi korban tindak pidana mendapat perlindungan dan kepentingan hak-haknya terpenuhi. Pemerintah sebagai alat kekuasaan politik suatu negara seharusnya lebih memberikan perhatian lebih bagi warga negaranya tidak hanya memberikan janji saat berkampanye tetapi setelah terpilih dan duduk di kursi kekuasaan justru melakukan pembiaran.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1***, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- AdiSulistiyo, ***Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia***, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2006
- A. Muri Yusuf, ***Metodologi Penelitian***, Padang:UNP Press,2005
- Bambang Poernomo, ***Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Di Indonesia***, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982
- Barda Nawawi Arief, ***Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan***, Citra Aditya Bakti , Bandung, , 2001
- Bernard Raho,***Teori Sosiologi Modern***. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- Dikdik M. Arief Mansur dan lisatris Gultom, ***Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: antara Norma dan Realita***, Rajawali Pres, Jakarta, 2006
- Fred. Schwarz,***You Can Trust the Communists***. New Jersey: Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, 1960
- J.C.T Simorangkirdan Woerjono Sastropranoto, ***Pelajaran Hukum Indonesia***, Gunung agung Jakarta, 1962
- Mardjono Reksodiputro, ***Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum***, Universitas Indonesia, 2007
- Mariam Budiardjo, ***Dasar-Dasar Ilmu Politik***, Gramedia, Jakarta, 1986
- Moeljatno, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Rineka Cpta, Jakarta, 2008
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Hukum Pidana***, Alumni, Bandung,1992
- Mudzakir, ***Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana***, Disertasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 2001
- S.M.Amin dalam C.S.T.Kansil ,***Pengantar Ilmu Hukumdan Tata Hukum Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Sudikno Mertokusumo, ***Mengenal Hukum : Suatu Pengantar***, Yogyakarta, Liberty, 1999

Sudiman Kartohadiprodjo, ***Hukum Nasional, Beberapa Catatan***, Binacipta, Bandung, 1971

Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 1995

Tim UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Iliaschatzis, dkk, ***Praktik Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir***, LPSK, Jakarta, 2010

Tom Bottomore, dkk. ***Karl Marx: Selected Writings in Sociology and Social Philosophy***. Victoria: Penguin Books, 1979

Tongat,SH, ***Pengantar Hukum Pidana***, umm press, Malang, 2004

KAMUS

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III***, Jakarta, Balai Pustaka,

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta

MAKALAH/ARTIKEL

Bambang Djoyo Supeno, ***Diklat Viktimologi***, Semarang, 1997

Departemen Agama RI, ***Konflik Sosial Bernuansa Agamadi Indonesia***. (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2003)

Theodora Shah Putri, ***Upaya perlindungan Korban Kejahatan melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi***, Fakultas Hukum Indonesia MaPPI-fHUI, 2008

Rully, Yudhiarma, Andhira, ***Kerusuhan Sampang Konflik Keluarga, Bukan Agama***, Suara Karya (online), 25 Agustus 2012

Fatthkurohman Taufiq, ***Kronologi Kerusuhan Sampang versi Polisi***, Tempo. co, 26 Agustus 2012

Anik, ***Polda Jatim Masih Dalam Kasus Sampang***, RRI Makassar. com,27
Agustus 2012

DATA INTERNET / MEDIA MASSA

<http://forum.viva.co.id/sejarah/333074-julukan-julukan-yang-diberikan-dunia-untuk-negara-indonesia.html>

<http://www.indowarta.co/detail-2432-ketua-dpd-irman-gusman-%E2%80%9Ckonflik-di-sampang-mencederai-konstitusi%E2%80%9D.html>

<http://www.rrimakassar.com/polda-jatim-masih-dalami-kasus-sampang.htm>

<http://blog.ideguru.com/2012/12/pengertian-konflik.html>

<http://bahasa.cs.ui.ac.id>

<http://bayuzamora.blogspot.com/2013/01/pengertian-konflik-menurut-para-ahli.html>

<http://shnews.co/detile-14793-mengatasi-konflik-sosial-di-indonesia-.htm>

www.RakyatMerdekaOnline.com

<http://surabaya.okezone.com/read/2013/06/21/521/825293/ini-kronologi-pengusiran-warga-syiah-di-sampang>

Edutekno.mitraneews.com//pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=5085

Iyan88simple.blogspot.com

Shecyndi.blogspot.com

<http://apr1ana.wordpress.com/2011/11/14/bentuk-bentuk-akomodasi>

<http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/7%20Trisno%20Rahardjo.pdf>

PERUNDANG-UNDANGAN

Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban diadopsi dari Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (adopted by General Assembly resolution 40/34 of November 1985)

Resolusi Majelis Umum PBB No.40/34 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Darurat Tahun 1955

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi Dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik

1. Wawancara Narasumber



2. Sekolah Darurat Pengungsian korban Konflik Sampang Madura



3. Ruangan dalam GOR Sampang Madura





4. Kondisi Sekitar GOR Sampang Setelah Banjir





